

IDENTITAS ACEH DAN INDONESIA; MELIHAT ACEH DAN INDONESIA DALAM PERSPEKTIF SEJARAH

Oleh: Irwan

Dosen Prodi Pendidikan Sejarah, FKIP Universitas Serambi Mekkah

Email: irwan2adaby@gmail.com

Abstrack

The tempestuous relationship between Aceh and Indonesia made many experts frequently connect among Aceh and Indonesia Identities. It is impressed that the allignment between both identities are coercion and only delusion of Aceh people who are considered lost in their aceh identities. That matter is considered to have been engineered by Indonesia to establish sosial and cultural hegemony of javanese in Indonesia Republic. Beside, many people do not have knowladge about the the beginning process of the Aceh becoming part of indonesia and how the dynamic and transformation process of both identity which have been united in Indonesia. This research reviewed the transformation both identity in historical perspective based on the facts and political communication from both identity.

Keyword: *Aceh, Indonesia dan Identity Transformation*

الملخص

العلاقة بين انثيه واندونيسيا التي تكون في الغالب متقلبة، مما يجعل العديد من الخبراء في كثير من الأحيان الخلط بين هوية أنثية واندونيسيا حتى تكون أعجب أن المقارنة بين هاتين الهويتين هي الإكراه ورغبات سكان أنثيه الذين يعتبرون على أنهم فقدوا هوية صفتهم وعاداتهم أو تعتبر الهندسية من حكومة أندونيسيا لدعم هيمنة السلطة الاجتماعية والثقافية الجاوية داخل جمهورية إندونيسيا. وراء كل ذلك، هناك ليس الكثير من شعبنا يعرفون للعملية الأساسية عن كيف أصبحت أنثية أحدا من جزيرة أندونيسيا وكيف تكون الديناميات والتحول في تلك الهويتين حتى تكونا متحدتين في اندونيسيا. وتستكشف هذه الدراسة عن التحول بين الهويتين مع المنظورات التاريخية على أساس الحقائق القائمة، والاتصالات السياسية بينهما

الكلمات الأساسية : أنثية واندونيسيا وتحول الهوية

A. PENDAHULUAN

Masyarakat Aceh memiliki kebanggaan besar terhadap identitas mereka, selama-lama berabad-abad mereka memandang diri mereka sebagai bangsa yang merdeka dan bebas bersaing dengan bangsa-bangsa lain di Asia Tenggara.¹ Kebanggaan masyarakat Aceh akan identitas mereka diatur dan dikelola oleh lembaga kesultanan Aceh yang pada tahun 1903

dibubarkan secara sepihak oleh pemerintah kolonial Belanda. Meski demikian identitas masyarakat tidak serta merta hilang seiring dengan pembubaran kesultanan Aceh tersebut.

Sejak pembubaran kesultanan, masyarakat Aceh menganggap bahwa Belanda adalah satu-satunya penyebab hilangnya kebanggaan masyarakat terhadap identitas mereka. dan ketika muncul identitas baru (nasionalisme Indonesia) tahun 1945, masyarakat Aceh menerima identitas tersebut dengan harapan mampu mengembalikan identitas lokal mereka

¹ Anthony Reid, *Menuju Sejarah Sumatera* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2011), hlm. 341

sebelumnya yang telah dihancurkan oleh kolonial Belanda. Perjuangan dan penerimaan masyarakat terhadap identitas baru bisa dikatakan sebagai usaha mereka untuk mengembalikan kebanggaan Aceh.²

Kebanggaan masyarakat Aceh terhadap identitas mereka dan kebencian mereka terhadap kolonial Belanda, memudahkan mereka menerima identitas luar yang berseberangan dengan dengan kepentingan dan kekuasaan kolonial Belanda. Ini dibuktikan dengan penerimaan masyarakat Aceh (sebagian masyarakat Aceh) terhadap kehadiran Jepang yang meski masih tergolong bangsa kafir namun relatif mudah berinteraksi dengan masyarakat Aceh. Bahkan kehadiran Jepang ke Aceh direncanakan secara matang oleh kelompok-kelompok besar di Aceh. Hal ini tidak jauh berbeda dengan kehadiran identitas Indonesia di Aceh yang sesungguhnya sudah dimulai sejak awal tahun 1920-an.³

Setelah Letnan Jendral J. van Swieten mengumumkan penaklukan Kerajaan Aceh pada 31 Januari 1874 dan menyatakan wilayah Aceh Besar sebagai bagian dari wilayah Hindia Belanda, maka sejak itu beralihlah fokus Aceh dari Dunia Melayu dan Samudera Hindia ke Pulau Jawa yang menjadi pusat pemerintahan kolonial Belanda.⁴ Menurut Elson (2009), Pembangunan sarana transportasi dan aktivitas transmigrasi baik dilakukan oleh pemerintah maupun personal membuat semakin banyaknya kontak antar ras dalam masyarakat wilayah Hindia Belanda yang memunculkan saling pengertian dan saling paham sekaligus menghilangkan persaingan

yang ada sebelumnya.⁵ Dalam kasus Aceh pemikiran ini tidak sepenuhnya bisa digunakan karena adanya beberapa fakta yang menggambarkan sulitnya pergerakan yang dimotori oleh orang bukan Aceh, menurut Reid (2012), hal tersebut lebih banyak disebabkan proteksi Pemerintah Kolonial Belanda dan perasaan curiga oleh masyarakat Aceh sendiri terhadap orang bukan Aceh yang (pernah) menjadi bagian dari usaha kolonialisme Belanda di Aceh.⁶ Namun yang terpenting dari interaksi tersebut adalah munculnya nasib yang sama (sebagai bangsa terjajah) antara masyarakat Aceh dan bumiputera Hindia lainnya.

Di sisi lain, untuk mengambil hati masyarakat Aceh, Pemerintah Kolonial Belanda menerapkan politik pasifikasi (perdamaian) yang meliputi bidang politik, ekonomi, sosial dan kebudayaan.⁷ Politik pasifikasi ini adalah pengembangan dari ide Snouck Hurgronje, yang menilai penaklukan Aceh melalui jalan kekerasan oleh Belanda tidak berlangsung efektif.⁸ Salah satu hasil penting dari politik pasifikasi ini adalah pembangunan pendidikan modern di Aceh. Di beberapa tempat dibangun sekolah-sekolah meski pada pelajarannya terbatas pada putra dan sanak famili *uleebalang* atau orang-orang yang memiliki kekuasaan dan kekayaan. Banyak dari rakyat Aceh yang

⁵ *Ibid.*, hlm. 9

⁶ Anthony Reid, *Sumatera: Revolusi & Elite Tradisional* (Jakarta: Komunitas Bambu, 2012), hlm. 29-31

⁷ T. Syarwan, *Pendidikan Barat Untuk Penduduk Bumi Putera Di Aceh 1900-1942*, Tesis, (Yogyakarta: Program Pascasarjana UGM, 2002), hlm. 66

⁸ Lihat Laporan tentang Aceh oleh kepada Snouck Hurgronje kepada Pemerintah Hindia Belanda dalam E. Gobebe dan C. Adriaanse, *Nasihat-nasihat C. Snouck Hurgronje Semasa Kepegawaiannya Kepada Pemerintah Hindia Belanda-Jilid III* (Jakarta: INIS, 1990), hlm. 57-108

² *Ibid.*, hlm. 343-344

³ *Ibid.*, hlm. 343

⁴ R. E. Elson, *The Idea of Indonesia* (Jakarta: Serambi, 2009), hlm. 8

masih menolak memasukkan anak-anak mereka dalam sekolah-sekolah Belanda, namun demikian melalui produk lembaga-lembaga pendidikan tersebut nasionalisme Indonesia di Aceh berkembang dan menemukan pula orang-orang yang tepat untuk mengembangkannya.

Menjelang berakhirnya kekuasaan Kolonial Belanda di Aceh, para nasionalis muda daerah hasil didikan sekolah Belanda telah menjadi tokoh-tokoh yang menduduki jabatan strategis dalam pemerintahan dan organisasi-organisasi rakyat lainnya, dan mereka sering sekali vokal dalam mengkritisi kebijakan Kolonial Belanda yang bermaksud mengisolasi Aceh dari pengaruh daerah Hindia lainnya. Legitimasi para nasionalis muda ini (terutama T. Nyak Arief) semakin kuat karena komunikasi intensif yang dibangunnya terhadap kelompok ulama reformis (PUSA), dan berujung pada semakin kuatnya ide-ide Nasionalisme Indonesia berkembang di Aceh. Pada awal tahun 1940 an, PUSA telah menjadi kekuatan alternatif Masyarakat Aceh yang dianggap mampu menyaingi kekuasaan para *uleebalang* yang semakin jauh dari rakyatnya.

B. TRANSFORMASI IDENTITAS DARI ACEH MENJADI INDONESIA

Secara umum, identitas bumiputera yang baru mulai terbentuk sejak penyebaran terbatas pendidikan Belanda pada penduduk bumiputera yang mulai diberlakukan pada akhir abad ke sembilan belas. Sarana pendidikan membuat masyarakat bumiputera memiliki alat analisis yang mendorong munculnya kesadaran baru tentang nasib dan status mereka selama menjadi rakyat terjajah sekaligus mampu melihat perlakuan diskriminatif pada mereka selama kekuasaan kolonial. selain itu pendidikan juga mengubah cara pandang

masyarakat terpelajar menjadi cara pandang Eropa yang “modern” dan “rasional”. Sarana lain pembentukan identitas baru bumiputera adalah penerbitan surat kabar dan majalah yang membuat masyarakat suku di Hindia Belanda memahami persamaan dan perbedaan kondisi dalam kekuasaan kolonial. Penyelenggaraan ibadah haji di Mekkah juga merupakan sarana efektif bagi penyebaran informasi kehidupan masyarakat bumiputera.⁹

Penyelenggaraan pendidikan Belanda secara terbatas pada akhir abad kesembilan belas menjadi sarana bagi penemuan identitas baru bumiputera meski awalnya tidak mendapat yang memuaskan dari bumiputera karena khawatir akan merusak budaya lokal setempat.¹⁰ Bagi masyarakat Aceh, pendidikan berdampak pada tumbuhnya kesadaran ketertinggalan mereka di segala bidang sekaligus memberi gambaran yang jelas tentang kehancuran sosial, ekonomi, politik, agama, dan budaya Aceh akibat perlawanan sporadis menghadapi kekuasaan kolonial Belanda di Aceh. Dalam penyelenggaraan pendidikan pesan-pesan nasionalisme terserap oleh anak-anak Aceh melalui para guru yang kebanyakan berasal dari luar. Meski demikian, sekolah-sekolah swasta yang dikelola oleh Muhammadiyah dan Taman Siswa masih dianggap “orang luar”, oleh sebab dampak kebijakan isolasi Aceh dari wilayah Hindia lainnya. Fakta bahwa sekolah dan tenaga pengajar kebanyakan dikelola orang non-Aceh membuat tokoh-

⁹ R. E. Elson, *op. cit.*, hlm. 12-15

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 12. Ali Hasjmy mengungkapkan dampak dari “kampanye anti Belanda” di Aceh adalah penolakan masyarakat terhadap segala sesuatu yang ada sangkut-pautnya dengan Belanda, dari penolakan terhadap sekolah-sekolah Belanda sampai pada poliklinik-poliklinik didirikan Belanda, lihat Ali Hasjmy, *Semangat Merdeka*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1985), hlm. 34

tokoh Aceh mendorong bagi orang asli Aceh bersedia mengelola sekolah-sekolah yang ada di Aceh.¹¹ Menurut Reid, dorongan tokoh-tokoh Aceh ini akibat dari kehausan modernisasi yang baru dalam masyarakat sekaligus semangat nasionalisme yang mulai berkembang dan keyakinan akan segera berakhirnya kekuasaan kolonial Belanda. Gerakan pendidikan yang dikelola oleh orang Aceh semakin menguat pada tahun 1930-an setelah kaum ulama tradisional mengambil posisi dan peran melalui organisasi PUSA.¹²

Seiring dengan tumbuh dan berkembangnya ide-ide nasionalisme Indonesia di Pulau Jawa, dilanjutkan dengan munculnya organisasi-organisasi pergerakan dan pendidikan seperti SI, Muhammadiyah dan Taman Siswa. Tidak membutuhkan waktu lama bagi organisasi-organisasi ini untuk mengembangkan organnya bahkan sampai ke Aceh. Organisasi pertama yang berhasil mendirikan cabangnya di Aceh dan mendapat pengikutnya yang lumayan banyak adalah SI. Pada tahun 1916, SI telah mempunyai anggota kurang lebih seribu orang yang terdiri dari para uleebalang dan saudagar.¹³

Partisipasi lumayan masyarakat Aceh dalam SI menunjukkan adanya harapan besar akan kebangkitan kembali Aceh dalam perjuangan merebut

kemerdekaan dari kekuasaan kolonial. selain itu, tokoh-tokoh SI di Aceh menggunakan spirit Islam dalam proses rekrutmen anggota dan pengelolaan organisasi yang membuat organisasi ini semakin menyebar pada wilayah Aceh lainnya. Di Lhokseumawe, para calon anggota disumpah sebelum menjadi anggota SI dengan menggunakan kitab suci al-Quran dan pembacaan ritual-ritual lainnya, yang kurang lebih sama dengan bentuk sumpah yang dilakukan oleh kaum pejuang Aceh dalam menghadapi Belanda sebelumnya.¹⁴ Organisasi SI berkembang pesat, tidak saja diikuti oleh golongan pedagang tingkat kecil tapi juga oleh sebagian uleebalang dan pedagang besar dengan motivasi beragam. Di kebulubangan Geudong Aceh Utara misalnya, motivasi uleebalang terlibat didalamnya bukan dikarenakan oleh semangat ekonomi Islam namun lebih kepada semangat anti-kapitalis.¹⁵

Di Lhokseumawe, keterlibatan uleebalang lebih dimotivasi kepada kehidupan perekonomian mandiri dari masyarakat sekitarnya. Oleh karena itu pendirian koperasi-koperasi simpan pinjam menjadi program prioritas oleh pihak *uleebalang*.¹⁶ Selain memperkuat perekonomian diri dan anggota kelompoknya, SI juga berhadapan dengan kekuatan-kekuatan luar (terutama pemerintahan kolonial dan kelompok-kelompok pendukungnya) yang berpotensi menghambat perkembangan program yang dijalankan organisasi tersebut. Oleh karena itu, proganda mengenai isu persatuan kelompok Islam kerap dilakukan oleh tokoh-tokoh organisasi tersebut, tidak jarang para propagandisnya menerangkan tentang

¹¹ Sjamaun Gaharu mengungkapkan bahwa kesediaan mengajar di sekolah Taman Siswa karena dipengaruhi Teuku Hasan Dik dan Teuku Nyak Arief, nama terakhir adalah Panglima Sagi XXVI Mukim di Aceh Besar, lihat Ramadhan KH- Hamid Jabbar, *Sjamaun Gaharu; Cuplikan Perjuangan di Daerah Modal* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), hlm. 14

¹² Anthony Reid (2012), *op. cit.*, hlm. 33

¹³ Ali Hasjmy menyebut jumlah anggota SI di Pulau Aceh saja (pulau antara Uleelheu dan Sabang) mendekati duaratus orang pada tahun 1925 sebelum dibubarkan pada tahun 1926, lihat Ali Hasjmy (1985), *op. cit.*, hlm. 73-74

¹⁴ Anthony Reid (2012), *op. cit.*, hlm. 25

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 26

¹⁶ *Ibid.*

contoh-contoh yang dilakukan oleh organisasi SI di tanah Jawa dalam menghadapi lawan-lawannya tersebut. Pengambilan model kerja SI di Pulau Jawa sedikit banyak ikut mendekatkan Aceh dengan masyarakat Hindia Belanda lainnya terutama dalam hal persamaan nasib dan ide-ide kebangsaan yang mulai berkembang pesat di Pulau Jawa.¹⁷

Muhammadiyah juga mendapat pengikut yang tidak sedikit di Aceh setelah berhasil mendirikan beberapa sekolah Islam yang modern meski sedikit banyak berbenturan dengan ulama-ulama tradisional Aceh terutama setelah berbenturan dengan PUSA khususnya dalam kasus pemulihan kembali Kerajaan Aceh.¹⁸ Aktivitas Muhammadiyah di Aceh sedikit berbeda dengan yang terjadi di Pulau Jawa. Selain bergerak di bidang pendidikan, para tokoh Muhammadiyah juga menjadi politisi yang

kadangkala kerap berbenturan dengan pemerintah kolonial dan juga organisasi atau kekuatan-kekuatan lokal lainnya.¹⁹ Penting juga dicatat disini proses pembaharuan agama oleh Muhammadiyah cenderung tidak berlangsung sukses karena dianggap terlalu keras dan vulgar mengkritik budaya agama lokal. Meski PUSA juga melakukan kegiatan serupa, aktivitas mereka relatif lebih diterima oleh masyarakat Aceh, karena pendekatannya persuasif dan tidak menyinggung pemahaman lokal masyarakat dalam beragama.²⁰

Kemunculan organisasi pergerakan dan pendidikan di Aceh, menggiring masyarakat Aceh terutama para pengikutnya akan kesatuan masyarakat Hindia Belanda baik secara geografis maupun politik. Perkembangan dan keadaan masyarakat kolonial di daerah lain mulai dibandingkan dan dijadikan inspirasi bagi dunia pergerakan di Aceh. Ditambah dengan masih besarnya sentiment anti-Belanda (meski bersifat laten), ide Nasionalisme Indonesia mulai dikenal dan berkembang di Aceh terutama pada generasi muda yang memperoleh pendidikan baik di sekolah Belanda atau di sekolah swasta lain. Perkenalan masyarakat terhadap ide-ide Nasionalisme Indonesia mendapat perhatian dari Pemerintah Belanda, sehingga organisasi SI dinyatakan terlarang dan sekolah-sekolah swasta tidak dibenarkan lagi beroperasi. Penangkapan terhadap

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 27

¹⁸ Rusdi Sufi menyebut Muhammadiyah sebagai salah satu penyebab timbulnya dinamisasi sosial dalam masyarakat Aceh. Menurutnya, kemunculan organisasi lokal khususnya PUSA karena adanya tantangan dari Muhammadiyah yang memperkenalkan konsep-konsep baru tentang pendidikan dan organisasi, lihat Rusdi Sufi, *Muhammadiyah dan Dinamisasi Masyarakat di Aceh Tahun 1927-1942*, dalam Anonimus, *Pendidikan Sebagai Faktor Dinamisasi dan Integrasi Sosial* (Jakarta: Depdikbud, 1989), hlm. 49. Hubungan Muhammadiyah dan PUSA sedikit merenggang ketika pada Januari 1939 para ulama dan kelompok pedagang kecil mengeluarkan petisi mendukung pemulihan kembali Kerajaan Aceh oleh pemerintah kolonial yang dimuat oleh pers. Kaum uleebalang dipimpin oleh Teuku Mohammad Hasan (Bekas Konsul Muhammadiyah Aceh) menentang petisi dan rencana tersebut dan menuduh PUSA terlibat dalam rencana pemulihan kesultanan tersebut, tuduhan Mohammad Hasan membuat hubungan PUSA dan Muhammadiyah meruncing dan berdampak pada sulitnya gerakan-gerakan Muhammadiyah di Aceh, lihat Ismuha, dkk., *Pengaruh PUSA terhadap Reformasi di Aceh*, dalam Anonimus, *Agama, Perkembangan Fikiran dan Pembangunan* (Jakarta: Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, 1979), hlm. 51-52.

¹⁹ Pimpinan Muhammadiyah di Aceh (terutama konsul pertama dan kedua) berasal dari kalangan uleebalang yang berkuasa, dalam hal ini legitimasi agama tidak dimiliki oleh Muhammadiyah terutama dalam hal mengeluarkan fatwa hukum syariah, Ismuha, *Ulama Aceh Dalam Perspektif Sejarah*, dalam Taufik Abdullah (ed.), *Agama dan Perubahan Sosial* (Jakarta: Rajawali, 1980, hlm. 64. Lihat juga Nazaruddin Sjamsuddin, *Pemberontakan Kaum Republik* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1990), hlm. 6

²⁰ Taufik Abdullah (1983), *op. cit.*, hlm. 64

terhadap tokoh-tokoh SI dan Muhammadiyah di Aceh dilakukan oleh Belanda dalam rangka mengisolasi Masyarakat Aceh dari pertumbuhan semangat persatuan Masyarakat Hindia lainnya yang mulai membesar di Pulau Jawa.²¹

Perkembangan politik Aceh yang mulai tidak menguntungkan Belanda sejak tahun 1920-an, terutama setelah hadirnya organisasi luar Aceh tersebut, mendorong pemerintah kolonial menerapkan kebijakan isolasi Aceh dari pengaruh luar sekaligus mendorong penduduk lokal mengambil peran lebih besar dalam pembangunan Aceh. Beberapa organisasi lokal mulai didirikan di Aceh baik itu di bidang sosial, ekonomi, pendidikan maupun agama.²² Dan organisasi yang paling besar dan berpengaruh adalah PUSA yang didirikan oleh kelompok ulama lokal Aceh. Dalam waktu singkat PUSA telah berkembang sebagai satu-satunya organisasi lokal yang bergerak dalam modernisasi bidang pendidikan dan keagamaan di Aceh persis seperti dilakukan oleh Muhammadiyah.

Seiring proses PUSA sudah dalam posisi sebagai representasi dari masyarakat Aceh baik dilihat dari kuantitas anggota maupun kualitas gerakannya. Perkembangan dan perubahan dalam kehidupan masyarakat

Aceh mau tak mau harus disikapi PUSA terutama terkait dengan kehidupan masyarakat banyak, dan dalam hal ini sikap kritis harus diambil PUSA terhadap para uleebalang yang melakukan penyimpangan dan penggelapan dana-dana umat. Tindakan ini menempatkan PUSA sebagai pembela utama kepentingan masyarakat banyak yang rentan menjadi korban penyimpangan para *uleebalang*. Banyak masyarakat yang sebelumnya kritis terhadap perilaku *uleebalang* turut menggabungkan diri dengan kekuatan PUSA. Kondisi ini dengan sendirinya telah menempatkan PUSA pada posisi yang berlawanan dengan kepentingan sekelompok *uleebalang* yang ujungnya menjadi oposisi dari *uleebalang* itu sendiri.

Pengambilan posisi yang berseberangan dengan *uleebalang* memunculkan kaum ulama sebagai kekuatan masyarakat sipil tandingan bersama struktur *uleebalang* yang sudah mapan.²³ Dengan posisi tersebut juga masing-masing pihak mencari sekutu yang sesuai dengan nilai perjuangannya, dalam hal ini PUSA bersukutu dengan mayoritas rakyat kecil dan golongan muda terpelajar yang sudah terpengaruh dengan ide-ide nasionalisme Indonesia, sedangkan *uleebalang* lebih banyak berharap pada kebaikan dan bantuan dari sekutu kolonialnya.

C. DINAMIKA ACEH DALAM NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, proses Aceh menjadi Indonesia dilalui dengan suara pro dan kontra kelompok-kelompok masyarakat di Aceh. Proses ini 'disempurnakan' pula dengan Perang Cumbok antara ulama (PUSA) dan rakyat kepada kelompok *uleebalang* dan berlanjut

²¹ Pada Februari 1921, Pemerintah Kolonial menahan tiga tokoh SI; Boedjang, Mat Said dan Abdul Latif. Ketiganya dibuang keluar Aceh sebagai hukuman dari aksi pergerakan mereka, lihat Anthony Reid (2012), *op. cit.*, hlm. 27

²² Beberapa organisasi lokal yang didirikan dalam periode ini antara lain; Syarikat Atjeh Moeda Setia (Juli 1916), Syarikat Oesaha (November 1916), Syarikat Atjeh (Mei 1917), Volksonderwijzersbond Atjeh (Desember 1918), Islam Menjadi Satu (1919), Tjinta Bangsa (Mei 1919), Syarikat Cooperatie Toeloeng Menoeloeng (Desember 1919), Bajoer Oesaha (Maret 1920), Kongsi Atjeh Sumatra (Juli 1920) dan Poesa (1939), lihat Anonimus, *Sejarah Pendidikan Daerah Istimewa Aceh* (Jakarta: Depdikbud, 1984), hlm. 55

²³ Ahmad Taufan Damanik, *Hasan Tiro: Dari Imajinasi Negara Islam ke Imajinasi Etno-Nasionalis* (Jakarta: FES dan AFI, 2010), hlm. 38

dengan kejadian pembersihan unsur-unsur feodalisme oleh gerakan Badan Keinsyafan Rakyat, berakhir pada jatuhnya ratusan korban jiwa dari masing-masing kelompok pendukung. Akhir dari konflik ini adalah kemenangan ‘sementara’ pihak PUSA atau *uleebalang*.

Meski berada pada pihak saling berseberangan pada awal proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945, kelompok PUSA dan *uleebalang* tetap menjadi pelopor ide-ide nasionalisme Indonesia dan berada dalam posisi teguh mempertahankan kemerdekaan dari usaha pendudukan kembali kekuasaan Kolonial Belanda di Aceh. T. Nyak Arief, T. Muhammad Hasan Dik, Tuanku Mahmud, T. Ali Panglima Polem, T. Cut Hasan, dan T. Muhammad Thajeb termasuk pendiri Republik Indonesia di Aceh yang besar perannya menyebarkan ide-ide nasionalisme pada generasi muda kaum terpelajar dan mereka termasuk dalam golongan *uleebalang* dan bangsawan Aceh. Sementara Tgk. Muhammad Daud Beureueh, Tgk. Haji Ahmad Hasballah Indrapuri, Tgk. Syekh Abdul Hamid, dan Tgk. Abdurahman Meunasah Meucap adalah golongan PUSA yang menetapkan pilihan rakyat Aceh bergabung dalam Negara Republik Indonesia, serta mengeluarkan fatwa wajib berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Pertentangan antar kedua kelompok tersebut menunjukkan adanya polarisasi dalam masing-masing kelompok yang berujung pada konflik seperti disebutkan sebelumnya. Dalam kelompok *uleebalang*, kubu konservatif dan moderat dibedakan oleh usia dan tingkat pendidikan yang ditempuh.²⁴ Kalangan konservatif masih

²⁴ Reid menyebut *uleebalang* muda yang berpendidikan barat mendekatkan mereka dengan pergerakan nasional Indonesia namun menjauhkan

ragu terhadap kekuatan negara baru (Indonesia) dapat meruntuhkan kekuasaan kolonial, dan secara tersirat menunjukkan kekuatiran akan eksistensi mereka setelah berdirinya negara baru.²⁵ Dalam kelompok PUSA, polarisasi terjadi dalam kelompok tua dan kelompok muda.²⁶ Kelompok muda cenderung lebih progresif dan menganggap *uleebalang* sebagai inti dari kekuasaan kolonial yang menyengsarakan rakyat Aceh. Perilaku *uleebalang* yang menyimpang menjadi sorotan kelompok muda, seolah-olah tidak ada peran *uleebalang* yang memihak pada kepentingan rakyat Aceh. Keterbatasan kelompok muda ini, pada kondisi tertentu mampu didinginkan kelompok tua hingga meletusnya aksi TPR oleh Husein al Mujahid. Secara khusus, Husein al Mujahid adalah pimpinan kelompok muda yang sudah bersentuhan dengan ide-ide progressif Tan Malaka melalui Nathar Zainuddin dan Xarim M.S.,- tokoh komunisme Sumatera pada dasawarsa keempat abad ke 20.²⁷

mereka dari bagian terbesar rakyat Aceh, lihat, Anthony Reid (2012), *op. cit.*, hlm. 31

²⁵ *Ibid.*, hlm. 272-273, tokoh menonjol dalam kelompok ini adalah Teuku Muhammad Daud Cumbok yang kelak menjadi pemimpin kelompok *uleebalang* menghadapi PUSA dalam perang Cumbok. Ia seorang yang keras dan berani terang-terangan mengekspresikan sikapnya mendukung kembali kehadiran Belanda di Aceh meski di depan pendukung setia Republik Indonesia.

²⁶ Nazaruddin Sjamsuddin membaginya dalam kelompok Ulama dan Zuama, masing-masing kelompok dapat dibedakan dari pandangan politiknya dan perbedaan latarbelakang. Zuama memiliki pendidikan agama yang cukup namun tidak menjadikan kerja pengajaran dan penyebaran agama (dakwah) sebagai profesi seperti halnya para ulama. Dari segi usia *Zuama* rata-rata berusia di bawah empat puluh tahun, lihat Nazaruddin Sjamsuddin, *op. cit.*, hlm. 7

²⁷ Anthony Reid (2012), *op. cit.*, hlm. 311, “Persatuan Perjuangan” Tan Malaka mempunyai pengaruh sama di Sumatera seperti halnya di Jawa. Pemikiran Tan Malaka mendapat sambutan hangat di Medan. Xarim M.S., Nathar Zainuddin dan Joenoos

Namun dibalik itu semua, semangat kemerdekaan terpancar dari mayoritas Masyarakat Aceh pada 1945. Residen Aceh T. Nyak Arief yang berasal dari golongan *uleebalang* adalah tokoh Republik Indonesia yang berperan besar membangun Indonesia di Aceh pada periode-periode awal. Keberanian sikap dari Nyak Arief menolak tawaran Belanda untuk menduduki kembali Aceh menjadi pemicu semangat bagi para pemuda dan ulama untuk semakin menyokong eksistensi Indonesia. Semangat Keindonesiaan masyarakat Aceh terlihat dengan menyamakan kualitas perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia senilai dengan perjuangan Rakyat Aceh dalam perang melawan Kolonial Belanda sebelumnya. Bahkan empat ulama terkenal Aceh memfatwakan hukum jihad bagi usaha mempertahankan kemerdekaan Indonesia.²⁸

Semangat kemerdekaan dengan cepat memperoleh bentuknya melalui pembentukan Komite Nasional Indonesia (KNI) Daerah Aceh pada 28 Agustus 1945 yang diketuai oleh T. Nyak Arief dan Badan Kelaskaran Angkatan Pemuda Indonesia (API) yang dipimpin Sjamaun Gaharu pada 10 Oktober 1945.²⁹ Sementara di pihak PUSA, respon terhadap kemerdekaan Indonesia disikapi dengan pembentukan Lasykar Mujahidin yang berfungsi sebagai kekuatan untuk menghadapi upaya Belanda kembali berkuasa di Aceh. Para mujahidin bersama badan kelaskaran rakyat lainnya beramai-ramai membentuk barisan

sepanjang pantai Aceh dengan tujuan untuk mencegah upaya Belanda mendarat kembali di Aceh.

Respon rakyat Aceh terhadap peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia 1945 menunjukkan adanya kesatuan kuat dalam kepemimpinan Masyarakat Aceh. Anthony Reid (2012), menyebut pemimpin di Aceh tampak lebih kuat dan lebih siap dalam menangani urusannya sendiri dibanding dengan di Sumatera Timur.³⁰ Sementara ahli lain menyatakan Revolusi Nasional 1945-1949, menyebabkan rakyat Aceh memperoleh kembali otonomi di bidang sosial, ekonomi dan politik secara efektif sebab pemerintah pusat tidak mampu campur tangan pada masalah-masalah setempat, termasuk keberhasilan mencegah kembalinya Belanda menguasai Aceh.³¹

Efektifitas kepemimpinan di Aceh membuat para tokoh Aceh berhasil memobilisasi pasukan besar ke Kota Medan-Sumatera Timur pada akhir tahun 1946 untuk menangkalkan pergerakan Belanda agar tidak masuk ke Aceh.³² Meski tidak terjadi pertempuran seperti yang dibayangkan oleh rakyat Aceh, namun upaya tersebut menunjukkan wilayah Aceh benar-benar dikuasai sepenuhnya oleh orang Aceh dan pada saat bersamaan sudah menyatakan komitmennya bergabung dalam negara Republik Indonesia. Sejak 1945, Rakyat Aceh sudah mendeklarasikan diri sebagai wilayah Republik Indonesia yang

Nasution adalah tokoh-tokoh komunisme Sumatera yang memiliki hubungan erat dengan Tan Malaka baik secara pribadi maupun ideologi.

²⁸ Lihat lampiran seruan empat ulama Aceh

²⁹ Ramadhan KH- Hamid Jabbar, *op. cit.*, hlm. 88, untuk mengetahui uraian mengenai pembentukan badan-badan resmi dan penyusunan pemerintah Daerah di Aceh, Lihat Hardi, S.H., *Daerah Istimewa Aceh: Latar Belakang Politik dan Masa Depannya* (Jakarta: Cita Panca Serangkai, 1993), hlm. 99-102

³⁰ Anthony Reid (2012), *op. cit.*, hlm. 259

³¹ Nazaruddin Sjamsuddin, *op. cit.*, hlm. 2

³² Amran Zamzami, *Jihad Akbar di Medan Area* (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm. 124-126. Pengerahan pasukan ke kota medan dikenang oleh masyarakat Aceh sebagai peristiwa medan area, untuk mengetahui latarbelakang dan detail peristiwa tersebut lihat, Lihat juga Tgk. A.K. Jakobi, *Aceh Daerah Modal: Long March ke Medan Area* (Jakarta: Seulawah RI-001, 1992), hlm. 93-105

bebas dari pengaruh kolonial. Penerimaan Masyarakat Aceh bisa dikatakan tanpa syarat, disebabkan oleh karena bayangan sebuah Negara Indonesia yang merdeka, tidak berbeda dengan kondisi Kerajaan Aceh sebelumnya yang kental yang merdeka dan bebas bersyariat Islam.³³

Kondisi Republik Indonesia sampai tahun 1949 tidak mengalami perubahan berarti yang berpengaruh terhadap daerah-daerah jauh khususnya Aceh. Bahkan pada saat itu bisa dikatakan konsep Republik Indonesia di Aceh sesuai dengan yang diimpikan masyarakat, penyelenggaraan negara dilaksanakan secara otonom oleh orang Aceh sendiri dan bebas dari intervensi Kolonial Belanda maupun aturan-aturan rumit dalam sebuah sistem ketatanegaraan. Pemimpin negara yang dipilih oleh sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Soekarno-Hatta beserta kabinetnya belum mampu menjalankan pemerintahan secara efektif, disebabkan oleh masih adanya Belanda yang ingin mengembalikan kekuasaan kolonialnya di Indonesia. Perhatian pemimpin negara lebih banyak tertuju pada usaha-usaha diplomasi dan revolusi fisik menghadapi kehadiran kembali Belanda di Indonesia. Suasana politik di Jakarta tersebut juga membuat nasionalisme Indonesia Masyarakat Aceh tidak mengalami perubahan signifikan. Sampai saat itu, Pemerintahan Indonesia di Aceh mampu mengatur dan mengelola rakyatnya secara mandiri dan tidak dibatasi oleh aturan-aturan kompleks dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

³³ Anthony Reid (2011), *op. cit.*, hlm. 344, Reid juga menyebut pengaruh propaganda Jepang yang putus asa atas kekalahan mereka kepada para generasi baru pelajar Aceh berhasil meyakinkan pelajar tersebut untuk merapatkan barisan di belakang Republik yang baru.

Setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat (RIS) pada perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB), Den Haag pada November 1949,³⁴ yang dilanjutkan dengan proses pembangunan politik, demokrasi, hukum, dan ekonomi dimulai sejak tahun 1950, hubungan negara dan daerah mulai menimbulkan gejolak. Ricklefs menyebut sebagian sejarah bangsa Indonesia sejak tahun 1950 berisi kegagalan kelompok-kelompok pimpinan secara berturut-turut memenuhi harapan tinggi yang ditimbulkan oleh keberhasilan perjuangan mencapai kemerdekaan. Sampai tahun 1957, kegagalan demokratisasi di Indonesia disebabkan oleh korupsi tersebar luas, ancaman disintegrasi wilayah, keadilan sosial belum tercapai, masalah-masalah ekonomi belum terpecahkan, dan banyak harapan-harapan masa revolusi digagalkan.³⁵ Sayangnya dalam Historiografi Indonesia tidak banyak tercatat sebab-sebab kultural sebagai salah satu kegagalan demokratisasi ini.³⁶

Dalam kasus Aceh, pada periode revolusi fisik tidak sulit bagi masyarakat Aceh untuk setia kepada Pemerintah Pusat karena mereka merasa aman dengan

³⁴ Dalam memoirnya, Hatta menyebut peristiwa ini sebagai proses penyerahan kedaulatan dari kolonial Belanda kepada Republik Indonesia Serikat (RIS), lihat Mohammad Hatta, *Memoir* (Jakarta: Tintamas, 1982), hlm. 558

³⁵ M. C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), hlm. 355

³⁶ Hasan Tiro menekankan sebab kultural sebagai salah satu biang dari kegagalan proses percobaan demokrasi pada periode 1950 – 1957, dalam hal ini dia menyebut falsafah negara Pancasila sebagai pengganti ideologi Islam dan sistem negara kesatuan atas suatu bangsa bersuku yang dianggapnya tidak berbasis pada kultur masyarakat Indonesia secara umum. Lihat Hasan Muhammad Tiro, *Demokrasi untuk Indonesia* (Jakarta: Teplok Press, 1999), hlm. 34-106

otonomi yang dimiliki, namun dipihak lain, otonomi membuat Pemerintah Pusat kehilangan muka karena sering dihadapkan pada situasi yang memaksa Pusat tunduk pada tuntutan Aceh sebagai imbalan atas kesetiaan mereka.³⁷ Kondisi ini berarti pula bahwa mimpi untuk mewujudkan sebuah negara yang betul-betul merdeka sebagai pengganti identitas lokal sebelumnya mulai menghadapi tantangan berat.

Kebijakan pertama Pemerintah Republik Indonesia dalam periode ini terhadap Aceh yang memperkeruh hubungan keduanya adalah meleburkan Daerah Aceh dalam wilayah Propinsi Sumatera Timur dengan Ibukota Medan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 5 tahun 1950 yang ditandatangani oleh Mr. Assaat sebagai Pemangku Jabatan Presiden dan Mr. Soesanto Tirtoprodjo sebagai Menteri Dalam Negeri, sebagai pengganti Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Undang-Undang No. 8/Des/Wk.PM/1949 sebelumnya, tentang pembentukan Aceh sebagai Propinsi dan Daerah Otonom dilengkapi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi Aceh dan Dewan Pemerintah Daerah terdiri dari lima anggota. Kebijaksanaan Pemerintah Pusat tersebut mengganggu stabilitas politik lokal karena menimbulkan pertentangan dalam kelompok-kelompok di Aceh khususnya golongan PUSA dan uleebalang sebagai seteru lama.³⁸ Bagi mayoritas masyarakat

Aceh terutama Golongan PUSA, peleburan Propinsi Aceh membuat mereka merasa terhina, dan nilai-nilai keagamaan mereka diabaikan para pejabat yang datang ke daerah itu. Hal tersebut kemudian memunculkan rasa kedaerahan yang kuat, yang mengarahkan rakyat pada sebuah pemberontakan berdarah.³⁹

D. PENUTUP

Meski hubungan kedua identitas berlangsung sangat dinamis bahkan cenderung panas dalam beberapa pada tahun berikutnya, namun pada awal proses pendirian Indonesia, rakyat dan daerah Aceh menjadi kelompok/daerah yang paling solid dalam mendukung dan menyokong negara baru itu. Perasaan dan soliditas ini muncul diakibatkan oleh kebencian mendalam Rakyat Aceh terhadap kolonialisme Belanda sekaligus untuk memelihara angan-angan mereka (rakyat Aceh) untuk hidup merdeka dan mandiri dalam mengelola daerah dan mengekspresikan kebanggaan terhadap identitas yang dianggap pernah jaya di masa lalu. Transformasi identitas ini dimulai melalui gerakan-gerakan pendidikan dan agama yang secara tidak disadari dapat berlangsung oleh karena kebijakan dari kolonial Belanda sendiri.

Republik Indonesia Serikat, sesudah berbentuk negara kesatuan akan terbagi dalam 10 propinsi administratif, diantaranya terdapat propinsi Sumatera Utara yang didalamnya meliputi daerah-daerah Keresidenan Aceh, Tapanuli dan Sumatera Timur. Tindak lanjut dari Pemerintah adalah dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang no. 5 tahun 1950, tentang pembentukan Propinsi Sumatera Utara dan pembubaran propinsi Aceh sekaligus membatalkan Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah no. 8/Des./WKPM/1949, tentang pembentukan Propinsi Aceh, lihat T. Alibasjah Talsya, *Sepuluh Tahun Daerah Istimewa Aceh* (Banda Aceh: Pustaka Putroe Tjanden, 1969) hlm. 31

³⁹ Nazaruddin Sjamsuddin, *op. cit.*, hlm. 3

³⁷ Nazaruddin Sjamsuddin, *op. cit.*, hlm. 2

³⁸ Hardi, S.H., *op. cit.*, hlm. 116-117. Pada tanggal 19 Mei 1950, disepakati Piagam Persetujuan RIS dan RI, yang dilanjutkan dengan pernyataan bersama antara pihak RIS dan RI pada 20 Juli 1950, tentang perubahan sistem dari negara federal menjadi negara kesatuan, dari Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perkembangan dari kesepakatan ini adalah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah no. 21 tahun 1950 yang menetapkan bahwa Daerah

Namun sayangnya, harapan dan angan-angan rakyat Aceh dalam negara Republik Indonesia tidak berjalan mulus, sehingga melahirkan perlawanan baru terhadap pemerintahan Indonesia yang akhirnya menjadi perlawanan terhadap identitas Indonesia. Perlawanan yang disebut terakhir diekspresikan melalui gerakan Aceh Merdeka 1976.

DAFTAR PUSTAKA:

- Ahmad Taufan Damanik, *Hasan Tiro: Dari Imajinasi Negara Islam ke Imajinasi Etno-Nasionalis*, Jakarta: FES dan AFI, 2010
- Ali Hasjmy, *Semangat Merdeka*, Jakarta: Bulan Bintang, 1985
- Amran Zamzami, *Jihad Akbar di Medan Area*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990
- Anonimus, *Agama, Perkembangan Fikiran dan Pembangunan*, Jakarta: Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, 1979
- Anonimus, *Pendidikan Sebagai Faktor Dinamisasi dan Integrasi Sosial*, Jakarta: Depdikbud, 1989
- Anthony Reid, *Menuju Sejarah Sumatera*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2011
- Anthony Reid, *Sumatera: Revolusi dan Elite Tradisional*, Jakarta: Komunitas Bambu, 2012
- Gobee dan C. Adriaanse, *Nasihat-nasihat C. Snouck Hurgronje Semasa Kepegawaiannya Kepada Pemerintah Hindia Belanda-Jilid III*, Jakarta: INIS, 1990
- Hasan Muhammad Tiro, *Demokrasi untuk Indonesia*, Jakarta: Teplok Press, 1999
- Hardi, S.H., *Daerah Istimewa Aceh: Latar Belakang Politik dan Masa Depan*, Jakarta: Cita Panca Serangkai, 1999
- Irwan, *Nasionalisme Indonesia Di Aceh; Persepsi Keindonesiaan Hasan Saleh dan Hasan Tiro, 1945-1970*, Yogyakarta: Tesis Fakultas Ilmu Budaya UGM, 2015
- Ismuha, dkk., *Pengaruh PUSA terhadap Reformasi di Aceh*, dalam Anonimus, *Agama, Perkembangan Fikiran dan Pembangunan*, Jakarta: Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, 1979
- Ismuha, *Ulama Aceh Dalam Perspektif Sejarah*, dalam Taufik Abdullah (ed.), *Agama dan Perubahan Sosial*, Jakarta: Rajawali, 1980
- M. C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011
- Mohammad Hatta, *Memoir* (Jakarta: Tintamas, 1982)
- Nazaruddin Sjamsuddin, *Pemberontakan Kaum Republik*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1990
- Ramadhan KH- Hamid Jabbar, *Sjamaun Gaharu; Cuplikan Perjuangan di Daerah Modal*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995
- R. E. Elson, *The Idea of Indonesia*, Jakarta: Serambi, 2009

- Rusdi Sufi, *Muhammadiyah dan Dinamisasi Masyarakat di Aceh Tahun 1927-1942*, dalam Anonimus, *Pendidikan Sebagai Faktor Dinamisasi dan Integrasi Sosial*, Jakarta: Depdikbud, 1989.
- T. Alibasjah Talsya, *Sepuluh Tahun Daerah Istimewa Aceh*, Banda Aceh: Pustaka Putroe Tjanden, 1969
- T. Syarwan, *Pendidikan Barat Untuk Penduduk Bumi Putera Di Aceh 1900-1942*, Yogyakarta: Tesis Program Studi Sejarah Program Pascasarjana UGM, 2002.
- Taufik Abdullah (ed.), *Agama dan Perubahan Sosial*, Jakarta: Rajawali, 1980
- Tgk. A.K. Jakobi, *Aceh Daerah Modal: Long March ke Medan Area*, Jakarta: Seulawah RI-001, 1992